



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUKY ALFIRMAN
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
3. NHK : 150157

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 11.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/113 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 846 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 360.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 197.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.116.644.720**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.506.179.595**F. HARTA LAINNYA** Rp. 425.000.000

Sub Total Rp. 23.604.824.315

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 23.604.824.315

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.